

**PENERAPAN SANKSI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)**

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia salah satunya adalah Indonesia, sehingga dalam menangani dan mencegah penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan- kebijakan diantaranya penerapan sosial distancing, physical distancing, sampai dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta menerbitkan aturan tentang protocol kesehatan dan sanksi bagi pelanggar. Kebijakan PSBB ini merupakan objek yang dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dikarenakan PSBB merupakan bentuk dari karantina kesehatan, Pemberian sanksi pidana ini untuk memberikan efek jera kepada pelanggar kebijakan PSBB. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar kebijakan PSBB dirasa kurang tepat, hal itu didasari pada sanksi pidana itu sendiri, dimana terdapat satu asas di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Maksudnya jika suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalur lain maka hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi PSBB, Perspektif Hukum Pidana

**IMPLEMENTATION OF LARGE SCALE SOCIAL RESTRICTION
SANCTIONS (PSBB) IN A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE
(Case Study Decision Number: 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)**

ABSTRACT

Indonesia is a law-based country, thereby any human or social activity on a regular basis must be based upon the rules of law and norms applying in society. Law cannot be separated from human life since it governs human behavior. Since the Covid-19 pandemic has struck the world including Indonesia, the government has issued several policies including the implementation of social distancing, physical distancing and Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) or Large- Scale Social Restrictions; and issued rules for health protocols and sanctions for violators. The PSBB policy is as referred in Article 93 of Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine since PSBB is a form of health quarantine. The criminal sanctions are applied to cause a deterrent effect to PSBB policy violators. The imposition of criminal sanctions on violators of the PSBB policy is deemed inaccurate since it is based on the criminal sanction itself whose one principle in Indonesian criminal law that regulates rules of criminal law which is ultimum remedium. This means that if a case can be resolved by other means, then criminal law should be used as a last resort in law enforcement.

Keywords: Implementation of PSBB's Sanctions, Criminal Law Perspective